

EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BUMDES DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN PARIWISATA DESA

Putri Mutiara Rakista
Politeknik Bisnis Mayasari
putrimutiara514@gmail.com

naskah masuk: Januari 2023, naskah diterbitkan: Februari 2023

Abstrak:

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pengelolaan secara mandiri. BUMDes berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, namun penyelenggaraan BUMDes dalam pengelolaan pariwisata desa mengalami beberapa kendala di antaranta yaitu dalam perencanaan hanya memprioritaskan kegiatan besar, promosi yang masih bersifat mikro, anggaran yang tidak mencukupi, dan fasilitas yang belum memadai. Tujuan dalam menelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi dampak penyelenggaraan kebijakan BUMDes dalam mendukung pengelolaan pariwisata desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan *literature review* (tinjauan literatur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan BUMDes dalam mendukung pengelolaan pariwisata desa berdampak positif pada masyarakat, Lembaga dan system sosial. Pengelolaan BUMDes pada unit pariwisata di desa pada kehidupan masyarakat, Lembaga dan sistem sosial membawa banyaknya perubahan diantaranya yaitu tumbuhnya inisiatif dan kreativitas yang terbangun antara Lembaga dan masyatakat, solidieritas masyarakat terjalin lebih erat pada masyarakat desa, sehingga sistem sosial yang terbangun pada masyarakat desa menjadi lebih positif.

Kata Kunci : Evaluasi, Dampak Kebijakan, BUMDes, Pariwisata.

Abstract:

BUMDes is a business entity whose capital is wholly or largely owned by the village through independent management. BUMDes originates from village wealth which is separated to manage assets, services, and other businesses for the welfare of the village community, but the implementation of BUMDes in village tourism management experiences several obstacles including planning only prioritizing large activities, promotions which are still micro, budgets that are insufficient, and inadequate facilities. The purpose of this research is to find out how to evaluate the impact of implementing BUMDes policies in supporting village tourism management. The research method used in this study uses a literature review approach. The results of the study show that the policy of implementing BUMDes in supporting village tourism management has a positive impact on society, institutions and social systems. The management of BUMDes in tourism units in villages in community life, social institutions and systems brings many

changes including the growth of initiative and creativity that is built between institutions and the community, community solidarity is more closely intertwined in village communities, so that the social system that is built in village communities becomes more positive.

Keywords: *Evaluation, Policy Impact, BUMDes, Tourism.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah sebesar 1.910.931 km². Luasnya wilayah Negara Indonesia Sebagian besar merupakan wilayah pedesaan, hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2022 wilayah administrasi pemerintah dan pulau di seluruh Indonesia sebanyak 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.266 kecamatan, 8.506 kelurahan, 74.961 desa dan 16.772 pulau. Maka dari itu, Sebagian besar masyarakat di Indonesia bermukim di wilayah pedesaan, sehingga dalam melakukan pembangunan negara, desa menjadi representasi keberhasilan suatu pembangunan di Negara Indonesia. Keberhasilan pembangunan desa dapat menciptakan stabilisasi bagi kehidupan masyarakat di Negara Indonesia (Sa'dullah, 2016).

Dalam mendorong pembangunan desa pemerintah pusat perlu memberikan keleluasaan atas

kewenangan desa untuk dapat mengelola secara mandiri. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan melalui Lembaga – Lembaga ekonomi tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa. Dalam melakukan pengembangan tersebut, Kebijakan Pemerintahan Daerah menjadi penguat untuk desa dapat melakukan pengelolaan dan pembangunan desa secara mandiri sesuai dengan potensi desa yang ada, sehingga pembangunan pedesaan dapat dilakukan secara efektif menyesuaikan dengan kebutuhannya masing -masing. (UU Nomor 32 tahun 2004)

Sebagai lembaga usaha, BUMDes menjadi kuat untuk dapat dikelola secara mandiri oleh desa karena modal yang dimiliki Lembaga tersebut sebagian besar merupakan milik desa, Modal tersebut berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat desa. Lembaga tersebut dapat menjadi stabilitas perekonomian desa serta dapat menjadi tonggak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Hardijono, 2014)

Namun, terciptakanya formulasi BUMDes yang dibentuk sangat baik oleh pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya kendala yang dihadapi, salah satunya yaitu pada saat pandemic covid. Seluruh perekonomian Indonesia menjadi tidak menentu, begitu pula dengan stabilitas perekonomian di daerah wilayah pedesaan. Dari data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) terdapat 15.768 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdampak pandemic. Pada tahun 2021 jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencapai 57.273. Dimana rinciannya 45.233 BUMDes yang aktif dan 12.040 BUMDes yang tidak aktif. Sebanyak 45.233 BUMDes yang masih aktif mempekerjakan 20.369.834 orang dan omset usaha mencapai Rp4,6 triliun selama 2021. Sehingga melalui BUMDes, desa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan potensi lainnya. (<https://bumdes.kemendesa.go.id/>). Dari

data tersebut menunjukkan bahwa pandemic covid-19 sangat berdampak bagi keberlangsungan BUMDes, pasalnya banyak BUMDes yang tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaganya.

BUMDes memiliki banyak unit usaha, salah satu unit usaha yang banyak dikembangkan saat ini yaitu pengelolaan potensi desa melalui pariwisata. Menurut Rahmanul (2021) Pariwisata merupakan satu dari banyaknya sektor unggulan sebagai penyumbang pendapatan negara yang terbesar di Indonesia. Pariwisata dibentuk sebagai sektor strategis nasional, hal ini karena pariwisata berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya sector pariwisata maka dapat meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas SDM, sebagai bagian dari pelestarian alam maupun budaya yang ada di Indonesia serta mampu menstabilkan taraf ekonomi masyarakat,

Pariwisata desa bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di wilayah desa yang senantiasa dilaksanakan secara

terencana dan berkesinambungan dengan melihat potensi desa itu sendiri.

Desa dapat mengelola seluruh kegiatan BUMDes dengan leluasa karena kegiatan ini memiliki dasar yang kuat, yang tercantum dalam berbagai kebijakan pemerintah mulai dari kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. BUMDes merupakan pengelolaan lembaga yang dibentuk untuk jangka Panjang oleh pemerintah, maka dari itu untuk mengelola BUMDes dibentuk dengan struktur kepengurusan organisasi yang terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Sehingga pengelolaan (PERMENDES, Pasal 10)

Pariwisata desa dapat menyuguhkan berbagai destinasi unggulan yang dapat memberikan pengalaman bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut diantaranya yaitu dapat mengenal adat budaya kehidupan masyarakat sekitar dengan melakukan sosialisasi dengan warga sekita, antar pengunjung maupun guiding. Maka dari itu sector pariwisata bukan hanya menyuguhkan keelokan dari destinasi unggulan tersebut namun dapat memperkaya wawasan bagi wisatawan

yang berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Berdasarkan data Kemendesa PDTT, rencana pemanfaatan dana desa tahun 2022 untuk desa wisata mencapai Rp 326,36 miliar. Hingga kini, terkait pengelolaan desa wisata telah dikelola oleh 5.037 BUMDes wisata. Dari uraian data tersebut menunjukkan bahwa desa telah memformulasikan pengelolaan BUMDes secara menyeluruh hingga pada sektor pariwisata.

Pariwisata desa juga dapat menjadi peluang masuknya wisatwan mancanegara, hal ini dapat dilihat dari data jumlah masuknya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama bulan januari hingga juni 2022 yaitu sebanyak 743.210 kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan ini naik sebanyak 929,66% apabila dibandingkan tahun 2021. Pada Juni 2022 mengalami kenaikan tajam sebanyak 1.973,96% dengan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 345.440 kunjungan (BPS, 2022).

Namun penyelenggaraan BUMDes dalam pengelolaan pariwisata desa mengalami beberapa kendala di antaranta yaitu dalam perencanaan hanya memprioritaskan event-event besar, promosi yang masih bersifat mikro,

anggaran yang tidak mencukupi, dan fasilitas yang belum memadai.

Permasalahan lain dalam pengelolaan BUMDesa yaitu seringkali Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah mendorong pendirian BUMDes hanya untuk memenuhi target program kegiatan dengan digelontor bantuan dana. Namun tidak dibarengi dengan pendampingan pengelolaan BUMDes di wilayahnya, kemudian Pemerintahan Desa juga seringkali kurang memperhatikan potensi, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana yang ada di desa. (Rahmanul, 2021; Nugraha, 2019; Sumiasih; 2018). Maka dari itu perlu adanya kajian analisis mengenai evaluasi dampak penyelenggaraan BUMDes dalam mendukung pengelolaan pariwisata desa.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya menjelaskan evaluasi dampak kebijakan penyelenggaraan BUMDes dalam mendukung pengelolaan pariwisata desa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, memberikan informasi, dan menambah wawasan peneliti, pembaca, maupun masyarakat tentang peran BUMDes

dalam mendukung pengelolaan pariwisata desa.

KAJIAN LITERATUR

A. Evaluasi Dampak

Evaluasi memiliki pengertian *Is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*, Stufflebeam (2012:28). Evaluasi dalam pengertian ini dilaksanakan dengan proses menggambarkan, mengamati dan mengumpulkan informasi-informasi penting. Evaluasi berguna untuk meneliti keadaan suatu sistem dan kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai referensi untuk memperbaiki sistem tersebut

Menurut Palumbo (dalam Wayne Parsons, 2011: 552) Evaluasi dampak merupakan hasil aktual yang dapat diukur dari penyelenggaraan suatu kebijakan maupun program pemerintah dari bagaimana cara implementor dalam menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapinya. Dampak merupakan akibat dari adanya intervensi suatu kebijakan maupun program pemerintah

oleh implementor terhadap sekelompok sasaran program kebijakan.

Menurut Rossi dan Freeman (dalam Parsons, 2011: 550) Evaluasi dampak merupakan sebuah cara pengukuran taraf ketercapaian dari suatu kegiatan program pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan acuan dari kebijakan pemerintah. Evaluasi dampak kebijakan tidak berfokus pada proses terselenggaranya kegiatan program pemerintah namun berfokus pada hasil yang akan di dapatkan dan ketercapaian program terhadap tujuan yang telah di formulasi serta apa yang dirasakan oleh sasaran program kebijakan.

Maka dari itu, penting untuk menganalisis evaluasi dampak kebijakan karena dapat menjadi acuan untuk formulasi kebijakan pemerintah selanjutnya dan meminimalisir hambatan – hambatan yang akan datang dimasa depan, serta dapat menjadi dasar untuk membuat kebijakan baru.

A. BUMDes

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga yang bentuk oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan

masyarakat dengan memberikan keluasaan untuk desa dapat mengelola secara mandiri potensi desa, maka dari itu dengan adanya BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan desa dapat terkelola dengan baik.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran, disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan:

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. Potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumberdaya alam di Desa;
- d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pengelolaan BUMDes dipisahkan dari organisasi Pemerintah Desa dengan beberapa prinsip-prinsip diantaranya yaitu pengelolaan BUMDes diantaranya yaitu Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, Sustainable (PERMENDES, Nomor 4 Tahun 2015).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan Pendekatan *literature review* (tinjauan literatur). Literature review merupakan metode penelitian yang di dasari dari sumber – sumber seperti buku, jurnal, UU, Kebijakan pemerintah, Publikasi, berita, media maupun sumber lainnya yang dapat dipercaya serta relevan dengan topik yang dibahas, kemudian sumber tersebut di rangkum dan dianalisis secara mendalam oleh peneliti (Thorne dkk., 2019; Massaro dkk., 2016; O'Connor dkk., 2017; Yuhertiana, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Masyarakat

Dampak terhadap masyarakat merupakan hasil evaluasi yang menunjukkan seberapa terdampaknya

masyarakat dari kebijakan pemerintah maupun program yang dilakukan. Semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan maka semakin bagus pula dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Dalam kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan terdapat prinsip-prinsip diantaranya yaitu mengenai penyelenggaraan kegiatan memberdayakan terhadap masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar bagi implementor kebijakan untuk melakukan pengelolaan pariwisata pada wilayah Indonesia, dengan tujuan untuk mengasah kemandirian dari masyarakat setempat terutama dari segi ekonomi, keterbelakangan dan kesenjangan.

Sebagai sasaran dari kebijakan ini, dukungan masyarakat dalam melakukan pengelolaan pengembangan desa wisata sangat diperlukan, karena keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari bagaimana partisipasi sasaran kebijakan. Maka dari itu, inisiatif dan kesadaran masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan ini untuk turut berpartisipasi dilakukan untuk mendukung setiap program kerja yang dibuat BUMDes tersebut dan sampai pada tujuan yang diharapkan. Kegiatan peningkatan kesadaran kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan,

sosialisasi, dan juga dengan bukti nyata, (Hastutik, 2021; dwi, 2021).

Hasil dari kegiatan Pemberdayaan masyarakat tersebut diantaranya yaitu masyarakat dapat menjalankan usaha pariwisata atau sarana pariwisata secara mandiri dan terarah. Berikut ini beberapa dimensi dari pariwisata yang dapat dikembangkan oleh masyarakat desa dalam pengelolaan desa wisata, diantaranya yaitu pengembangan daya tarik wisata desa, pengelolaan kawasan wisata, unit usaha yang bergerak pada bidang jasa seperti transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, spa serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, (Novianti, 2022).

Pengelolaan BUMDes pada unit pariwisata di desa yang terarah, terencana dan terkelola dengan baik berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat desa setempat. Masyarakat menjadi aktif, adanya wadah kreatifitas masyarakat, terbantunya ekonomi masyarakat desa sehingga dapat menjadi jawaban dari permasalahan kemiskinan pada kawasan masyarakat desa, adanya lahan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat menurunkan

angka pengangguran di desa, selain itu desa wisata yang mengusung konsep ekowisata akan membuat suatu desa dapat mempertahankan kelestarian alam dan budaya desanya (A'inun et al, 2015; Kadek, 2018; Novianti, 2022; Muslimah, 2021)

Adapaun beberapa unit pendukung kegiatan pariwisata desa yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat desa diantaranya yaitu seperti usaha cinderamata, penukaran uang (money changer), bank serta jaringan ATM nya, klinik kesehatan, usaha telekomunikasi, serta lembaga-lembaga pendidikan maupun kebudayaan sebagai bagian dari kelestarian budaya.

2. Dampak pada Lembaga dan Sistem Sosial

Lembaga memiliki peran penting dalam setiap penyelenggaraan kebijakan pemerintah. Terlaksananya kebijakan dengan baik dan terarah menjadi representasi dari bagaimana terkelolanya Lembaga itu sendiri. Lembaga dibentuk sebagai upaya manusia memenuhi kebutuhan rekreatifnya.

Kebijakan penyelenggaraan BUMDes dalam mendukung pariwisata desa berdampak positif pada Lembaga yang ada, hal ini karena lembaga memiliki peranan penting dalam peningkatan ekonomi desa sesuai dengan tujuan BUMDes yang

tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang BUMDes. Peran penting kelembagaan dalam penyelenggaraan BUMDes yaitu pada bidang ekonomi, Lembaga sebagai sarana untuk menurunkan ketidak pastian atau mengubahnya menjadi resiko (Azansyah, 2013; kokok, 2021). Faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi diantaranya Bumi dan Sumber Daya Alam, Tenaga Kerja, Prasarana dan Manajemen. Keempat faktor tersebut mengindikasikan kondisi ekonomi suatu wilayah. (Lemhannas, 2015)

Peran Lembaga yaitu mengelola sumber daya dan mendorong setiap potensi pariwisata yang ada, seperti potensi kekhasan dan keunikannya berupa pertanian, wisata membajak sawah, menanam padi, dan cooking class (Abdi, 2021). Dalam mendukung keberhasilan dari penyelenggaraan BUMDes khususnya pada unut pariwisata desa, Lembaga pemerintah dan organisasi Lembaga yang ada di desa dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk menggali potensi wisata. (Dwi, 2021).

Kelembagaan dapat berperan sebagai wadah sekaligus penggerak dalam memfasilitasi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang

pariwisata (Triambodo dan Damanik, 2015; Aeni, 2021; Wisianingsih, 2022).

Peran BUMDes ditinjau dari peran pemerintah maupun swasta dalam pengembangan desa wista menyangkut tiga hal, yaitu kesadaran (conscientization), pengorganisasian masyarakat (community organizing), dan penghantaran sumber daya manusia (resources delivery) (Hadiwijoyo, 2018).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri (2019) yang mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Lembaga untuk menyokong keberlangsungan pengelolaan BUMDes sangat penting, seperti adanya kegiatan pelatihan, FGD dan pendampingan tersebut dapat meningkatkan kemampuan manajerial, teknis dan administratif para pengelola BUMDes. Maka dari itu perlu adanya sinergitas antara kebijakan dengan penyelenggara kebijakan yaitu Lembaga pemerintah pusat, Lembaga pemerintah desa maupun organisasi desa yang ada.

Kebijakan tidak hanya dapat mengubah atau mempengaruhi lembaga lembaga, melainkan juga dapat mempengaruhi berbagai dimensi sosial. Kebijakan penyelenggaraan BUMDes pada aspek Lembaga dan system social dalam mendukung pariwisata desa berdampak positif, karena BUMDesa dapat mendorong

pengelolaan wisata menjadi lebih kuat dengan terbentuknya system sosial yang baik dimasyarakat. (Setiawan, 2018).

Banyaknya perubahan yang terjadi pada sistem sosial dimasyarakat desa, diantaranya yaitu tumbuhnya inisiatif dan kreativitas yang terbangun, solideritas masyarakat terjalin lebih erat pada masyarakat desa, sehingga system sosial yang terbangun pada masyarakat desa menjadi lebih positif. Adapun beberapa pekerjaan yang ditawarkan oleh BUMDes yaitu menjadi karyawan BUMDes, karyawan unit usaha BUMDes, masyarakat dapat membuat UMKM yang dibentuk oleh tim PKK.

Namun, pengelolaan BUMdes dalam beberapa hal masih terdapatnya hambatan, sehingga pengelolaan yang dilaksanakan masih belum sepenuhnya optimal, diantaranya yaitu kurangnya pembinaan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat desa membuat potensi besar tersebut belum maksimal dalam pengelolaannya. (Abdi, 2021; Rahmanul; 2021). Sehingga pemerintah perlu menetapkan unit wisata BUMDes sebagai peta jalan pengembangan pariwisata daerah (Dony, 2019), dengan begitu masyarakat, Lembaga, maupun organisasi yang ada dapat bersinergi

membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama.

SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan penyelenggraan BUMDes dalam mendukung pariwisata desa berdampak positif pada masyarakat, Lembaga dan sistem sosial terutama dalam bidang ekonomi, keterbelakangan dan kesenjangan sosial. Pengelolaan BUMDes pada unit pariwisata di desa pada kehidupan masyarakat, Lembaga dan sistem sosial membawa banyaknya perubahan diantaranya yaitu tumbuhnya inisiatif dan kreativitas yang terbangun antara Lembaga dan masyarakat, solideritas masyarakat terjalin lebih erat pada masyarakat desa, sehingga system sosial yang terbangun pada masyarakat desa menjadi lebih positif.

Penyelenggaraan bumdes dalam mendukung pengelolaan pariwisata desa perlu diperbanyak kegiatan pelatihan, FGD dan pendampingan sehingga dapat meningkatkan kemampuan manajerial, teknis dan administratif para pengelola BUMDes dalam mengelola pariwisata desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, I Nyoman dkk. 2021. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Green Tourism Di Desa Wisata Bakas, Banjarnegan,

- Klungkung. Dharmakarya Vol. 10, No. 2, Juni 2021
- A'inun, F., Hetty, K., & Rudi, S. D. (2015). Pengembangan desa wisata melalui konsep *community based* tourism. Prosiding KR: Riset & PKM. No 3 Vol 2.
- Alahi, M. E. E., & Mukhopadhyay, S. C. (2019). Literature Review. In Smart Sensors, Measurement and Instrumentation (hal. 7–41).
- Christiyanto, F., Nurfitriyah, & Sutadji. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2015. *eJournal Administrative Reform*, 4(2), 291-300.
- Diansari, R. E. (2016). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.
- Dony Setiawan, Thomas Gabriel Jostenz2, R. Djoko Andreas Novalino. 2018. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal Ekonomi Pertahanan | Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018*
- Dwi Hastutik, Dwiningtyas Padmaningrum, Agung Wibowo. 2021. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *Agritexts: Journal of Agricultural Extension*, 45(1), 46-58, 2021.
- Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., (2014). Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 3(2), 21-30.
- Hamzah B. Uno & Satria Koni. (2012). *Assessment Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadiwijoyo, S. S. (2018). Perencanaan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Yogyakarta: Suluh Media.
- Kadek Sumiasih. 2018. Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7 No. 4 Desember 2018, 565-585.
- Kokok Putra Siswand. 2021. Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Mengembangkan Wisata Embung Di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan. *Publika*. Volume 9 Nomor 3 Tahun 2021. 32.
- Ida Nur Aeni, Amir Mahmud, Nurdian Susilowati, Andhika Bella Prawitasari. 2021. Sinergitas Bumdes dalam Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan. *Abdimas Vol 25, No. 2 (2021): December 2021*.
- Ida Widianingsih, Haris Setiawan, Mifta Chuddin. 2020. Penguatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes Cipta Rahayu Di Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. *Kumawula*, Vol. 3, No.2, Agustus 2020, Hal 225 – 238
- Lintjewas, O., Tulusan, F., & Egetan, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Society: Jurnal*

- Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, 2(20), 82-95.
- Massaro, M., Dumay, J., & Guthrie, J. (2016). On the shoulders of giants: undertaking a structured literature review in accounting. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*.
- Muchamad Zaenuri, Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Iqbal. 2019. Penataan Kelembagaan Bumdes Berbasis Pariwisata. *Pengabdimas Altruis Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat VOL. 2, NO. 2, OKTOBER 2019*.
- Muslimah, Febri Yuliani, Adianto. 2021. Strategi Bumdes Dalam Pengembangan Unit Usaha Pariwisata (Studi Kasus Bumdes Banglas Bestari Di Desa Banglas Kabupaten Kepulauan Meranti. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 3, Bulan Desember Tahun 2021*.
- Ni Putu Ayu Diah Novianti, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti. Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengelolaan Keuntungan Objek Wisata Di Desa Ekasari Kabupaten Jembrana. *Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022*
- Nugraha, Adiatma dkk. Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 1, Nomor 1, Juni 2019*.
- O'Connor, A., Sargeant, J., & Wood, H. (2017). Systematic reviews. In *Veterinary Epidemiology: Fourth Edition* (hal. 397–420).
- Parsons, Wayne. 2006. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prayogya, Faiz Marwan. 2021. Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations): Vol. 05, No. 2, Mei 2021*.
- Rahmanul dan Mayarni. 2021. Pengelolaan Pariwisata Danau Napangga Berkelanjutan Oleh Bumdes Di Kabupaten Rokan Hilir. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 7, No. 1 / 2021*.
- Sa'dullah. (2016). Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Santis, S., Grossi, G., & Bisogno, M. (2018). Public sector consolidated financial statements: a structured literature review. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 30(2), 230–251*.
- Sumiasih, Kadek. 2018. Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 7 No. 4 Desember 2018, 565-585*.
- Suryanarayana, T. M. V., & Mistry, P. B. (2016). Review of Literature. In *SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology* (hal. 27–37).
- Suharsimi Arikunto & Cepi Safrudin Abdul Jabar. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stufflebeam, Daniel L.dkk. (2012). *Evaluation Theory, Models, & Applications*. San Francisco: Jossey-Bass.

- Triambodo, S., & Damanik, J. (2015). Analisis Strategi Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi di Desa Wisata Kerajinan Tenun Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, DIY). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Thorne, L., Andiola, L. M., Bedard, J. C., & Hux, C. T. (2019). Writing a literature review in Behavioural Accounting Research. In *The Routledge Companion to Behavioural Accounting*
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuhertiana, I. (2015). Behavioural Public Sector Accounting Research *In Indonesia: A Literature Review*. *Malaysian Accounting Review*, 14.
- Zulkarnain Ridlwan. 2013. Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013, ISSN 1978-5186
- Zhu, M., Sari, A., & Lee, M. M. (2018). A systematic review of research methods and topics of the empirical MOOC literature (2014–2016).